

Harapan sebagian masyarakat agar pemilu presiden berlangsung satu putaran terkabul. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu, memastikan kemenangan bagi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Secara menyeluruh bagi bagi pasangan presiden dan wakil presiden, Yudhoyono Boediono, periode 2009-2014 merupakan saat tepat untuk menorehkan tinta emas dalam perjalanan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan itu, mau tidak mau pemerintah mendatang wajib memfokuskan pada peletakan dasar demokrasi dan keadilan ekonomi, tak perlu lagi disibukan oleh hal-hal untuk mempertahankan kekuasaan seperti yang terjadi di pemerintahan yang lalu.

Karena, berbagai kondisi dan tantangan pemerintah sedang menanti untuk segera di selesaikan. Seperti, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di kisaran 4,4 persen di triwulan 1 2009, pemerosotan nilai riil upah pada periode yang sama di triwulan III 2008 sebesar 4,93 persen, sikap pemerintah yang tidak tegas menyebabkan menggantungnya Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, padahal tinggal tiga bulan lagi waktu efektif merampungkannya. Belum lagi permasalahan yang mengancam pertahanan negara, yaitu ditandai dengan minimnya anggaran pertahanan dan tak kalah pentingnya dengan tidak jelasnya keseriusan pemerintah dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM, karena selalu kental dengan kepentingan politik.

Menilik “5 Agenda dan 15 Prioritas” dengan paparan kondisi dan tantangan di atas, sungguh cenderung normatif, sehingga memungkinkan terjadinya penghindaran atau ‘ngeles’ dari apa yang dijanjikan dengan kondisi riil, karena yang ditawarkan tidak konkret. Maka di masa pemerintahannya yang kedua, seyogianya Yudhoyono-Boediono lebih memungkinkan melakukan terobosan program, khususnya dalam menegosiasikan kontrak karya dan utang luar negeri. Namun, hal ini diragukan, pasalnya mereka termasuk pemimpin yang suka bermain aman dan selain itu kebijakan program pemerintah pun masih besar berada dalam pengaruh kendali kapital internasional.

Mungkin ceritanya akan lain, bila Yudhoyono mampu menjelaskan cara dan tahapan mewujudkan program, termasuk sumber daya apa saja yang dimiliki atau minimal ada gambaran tentang kemampuannya mewujudkan janjinya. Namun selama ini beliau selalu menolak bicara tentang hal itu. Mungkin benar pendapat Andrinof Chaniago yang mengatakan, “jika hanya membuat daftar janji banyak orang bisa melakukannya”.

Sehingga memunculkan pendapat yang menyakini kondisi dan kebijakan pemerintah dalam lima tahun ke depan akan sama saja dengan pemerintah periode 2004-2009. Hal ini akan memunculkan sejumlah program yang menurut peristilahan pengamat politik Airlangga, populis, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kredit untuk pengusaha kecil. Memang dalam jangka pendek program populis ini menguntungkan beberapa pihak, tetapi pada akhirnya akan memukul rakyat kembali untuk jangka panjang. Sebab, program ini dibiayai oleh utang luar negeri dan bukan dari pengumpulan kekayaan atau hasil bumi nasional akan dibayar dengan APBN. Apa akibatnya? Anggaran yang seharusnya untuk kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan sosial akan habis terkuras untuk membayar berbagai penambahan utang tersebut.

Dalam catatan dan memori redaksi Wacana Kinerja, pasangan SBY-Boediono dalam kampanye akbar yang menjadi kampanye terakhir sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden lalu, sempat menguraikan lima agenda dan 15 prioritas kerja. Agenda dan prioritas kerja merupakan patokan bagi rakyat pemberi mandat untuk menuntut janji kelak di kemudian hari. Kelima agenda itu adalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pembangunan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penegakkan demokrasi dan menghormati hak asasi manusia, penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, dan pembangunan adil dan merata. Menurut Yudhoyono, kunci sukses lima agenda dan 15 prioritas kerja dalam lima tahun ke depan adalah hadirnya pemerintahan yang bersih, cakap dan tanggap. Bersama Boediono, Yudhoyono yakin akan mewujudkan program kebijakkannya itu, karena ia lurus, pekerja keras dan menguasai ekonomi.

Akhirul kalam, sekali lagi semuanya bermuara pada kesadaran demokrasi di Indonesia masih berpusat pada figuritas. “Lima Agenda dan 15 Prioritas” tidak boleh dipandang sebelah mata dan ditunggu pembuktiannya. Karena janji adalah janji, mau tidak mau, harus ditepati, sehingga memberi kebaikan kepada seluruh rakyat dan menjadi amal yang diterima Allah SWT.*** (Dayat Hidayat)